

KONSTRUKSI PERADABAN ISLAM: ANALISIS ISU-ISU POLITIK DAN PERGULATAN INTELEKTUAL DARI MASA RASULULLAH SAW HINGGA DINASTI ABBASIYAH

Emi Nilawati¹, Tiar Anwar Bachtiar², Naufal Syauqi Fauzani³

^{1,2,3} Pascasarjana Pendidikan Agama Islam, IAI PERSIS Garut, Indonesia

³ Mahad Aly Al-Asma Sumedang, Indonesia

larsipemi72@gmail.com, tiaranwarbachtiar@iaipersisgarut.ac.id, naufalsmdz@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 28-06-26

Disetujui: 09-07-26

Kata Kunci:

Dinasti Abbasiyyah
Dinasti Umayyah
Dinamika Politik
Gerakan Intelektual
Sejarah Peradaban
Islam

Abstract: *This study examines the history of Islamic civilization from the era of the Prophet Muhammad (PBUH) through the Abbasid Dynasty. It employs a qualitative approach utilizing library research methods, specifically through a historical analysis of relevant primary and secondary sources. The formal object of the study is the dynamic relationship between politics and intellectual movements, while the material object encompasses political developments and intellectual activities during the eras of the Prophet Muhammad (PBUH), the Rashidun Caliphate, the Umayyad Dynasty, and the Abbasid Dynasty. The scope of the research focuses on political transformations, the evolution of Islamic thought, and the reciprocal influence between the two in shaping classical Islamic civilization. The findings indicate that during the time of the Prophet Muhammad (PBUH), politics and intellectual life were fully integrated under divine guidance, manifested through the establishment of the Medinan state and a scholarly tradition grounded in the Qur'an and Sunnah. During the Rashidun era, issues of leadership succession and political conflict gave rise to the codification of the Qur'an, the tradition of **ijtihad** (independent legal reasoning), and the nascent stages of **kalam** (theology). The Umayyad Dynasty was characterized by the transformation of the governance system into a hereditary monarchy, accompanied by bureaucratic consolidation and the development of the codification of Hadith, **fiqh** (jurisprudence), and Arabic linguistics. Finally, the Abbasid Dynasty marked the pinnacle of intellectual development through translation movements, advancements across various disciplines, and the emergence of state-supported scholarly traditions, albeit amidst ongoing political dynamics and theological debates. The study concludes that political dynamics and intellectual movements shared a mutually influential, dialectical relationship, thereby serving as the primary foundation for the formation of classical Islamic civilization.*

Abstrak: sejarah peradaban Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga Dinasti Abbasiyah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis historis terhadap berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Objek formal penelitian adalah dinamika hubungan antara politik dan gerakan intelektual, sedangkan objek materialnya meliputi perkembangan politik dan aktivitas intelektual pada masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah. Lingkup penelitian difokuskan pada transformasi politik, perkembangan pemikiran keislaman, serta pengaruh timbal balik keduanya dalam membentuk peradaban Islam klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW politik dan intelektual terintegrasi secara utuh di bawah bimbingan wahyu melalui pembentukan negara Madinah dan tradisi keilmuan berbasis Al-Qur'an dan Sunnah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, persoalan suksesi kepemimpinan dan konflik politik melahirkan kodifikasi Al-Qur'an, tradisi ijtihad, serta embrio ilmu kalam. Dinasti Umayyah ditandai oleh transformasi sistem pemerintahan menjadi monarki hereditas yang disertai konsolidasi birokrasi serta perkembangan kodifikasi hadis, fikih, dan ilmu bahasa Arab. Adapun Dinasti Abbasiyah menjadi puncak perkembangan intelektual melalui gerakan penerjemahan, kemajuan berbagai disiplin ilmu, dan lahirnya tradisi ilmiah yang didukung negara, meskipun

tetap diwarnai dinamika politik dan perdebatan teologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika politik dan gerakan intelektual memiliki hubungan dialektis yang saling memengaruhi sehingga menjadi fondasi utama terbentuknya peradaban Islam klasik.



PENDAHULUAN

Hubungan antara otoritas politik dan dinamika intelektual merupakan salah satu poros paling krusial dalam menelaah bentang sejarah peradaban Islam. Sejak fajar kenabian pada abad ke-7 Masehi hingga runtuhnya Bagdad di bawah serbuan tentara Mongol pada abad ke-13 Masehi, Islam tidak hanya berkembang sebagai doktrin teologis, melainkan juga sebagai sebuah entitas politik dan episentrum peradaban ilmiah dunia. Dinamika ini memperlihatkan bahwa ruang intelektual dalam Islam tidak pernah lahir dari ruang hampa; ia senantiasa berkelindan, merespons, bahkan terkadang berbenturan dengan konstelasi politik yang sedang berlangsung pada masanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya Islam merupakan agama yang mampu membangun peradaban manusia (*Al-Islām Dīnun wa Al-Haḍārah*) (Alvianti et al., 2025; Daulay & Nasution, 2023; Dzulhadi, 2015; Fahmi, 2020)

Pada masa Rasulullah SAW, struktur politik dan kehidupan intelektual berada dalam integrasi yang utuh di bawah panduan wahyu. Konsep politik (*siyasah*) di masa ini termanifestasikan melalui Piagam Madinah yang meletakkan dasar-dasar pluralisme, keadilan, dan kedaulatan universal. Kegiatan intelektual pada periode awal ini bersifat fungsional dan transformatif, yang berpusat pada kodifikasi nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah untuk mendekonstruksi tatanan jahiliah menuju tatanan sosial yang beradab (Najib & Imawan, 2022; Thabrani, 2014; Urmilawati & Syarif, 2026). Integrasi antara otoritas politik dan otoritas keagamaan pada masa Rasulullah SAW menjadikan kepemimpinan Islam memiliki karakter yang berbeda dengan sistem pemerintahan monarki maupun oligarki yang berkembang di berbagai peradaban pada masa itu. Rasulullah SAW tidak hanya berperan sebagai nabi yang menyampaikan wahyu, tetapi juga sebagai kepala negara, hakim, panglima militer, dan mediator dalam penyelesaian konflik antarsuku. Dengan demikian, kebijakan politik yang diambil tidak didasarkan pada kepentingan kekuasaan semata, melainkan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum, menegakkan keadilan, menjaga persatuan masyarakat (*ummah*), serta melindungi hak-hak setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang suku maupun agama. Piagam Madinah menjadi manifestasi konkret dari prinsip tersebut karena mengatur hubungan antara kaum Muhajirin, Anshar, dan komunitas Yahudi dalam suatu kesatuan politik yang menjunjung tinggi tanggung jawab bersama, kebebasan beragama, dan supremasi hukum

Pasca-wafatnya Nabi Muhammad SAW, transisi kepemimpinan umat Islam membuka babak baru yang sarat dinamika sosial-politik dan ketegangan teologis. Sukses

di Saqifah Bani Sa'idah menghasilkan terpilihnya Abu Bakar as-Siddiq, yang mengonsolidasikan negara melalui Perang Riddah untuk menghadapi nabi palsu dan pembangkang zakat. Stabilitas tersebut dilanjutkan oleh Umar bin Khattab melalui ekspansi wilayah (*futūḥāt*) dan pembentukan administrasi negara yang kokoh (M. A. Q. Pratama, 2018; Sudrajat et al., 2026; Sulistiana et al., 2025; Wardana et al., 2025). Namun, pada masa Utsman bin Affan mulai muncul benih-benih faksionalisme akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dituduh cenderung nepotisme dan tata kelola ekonomi pusat, yang berpuncak pada pengepungan rumah khalifah dan pembunuhannya (Abrori et al., 2026; Wahyuni et al., 2025). Tragedi ini menjadi awal Fitnah al-Kubra pada masa Ali bin Abi Thalib, ditandai oleh Perang Jamal dan Perang Siffin. Kebuntuan dalam Perang Siffin melahirkan peristiwa Tahkim (arbitrase politik), yang kemudian menjadi titik lahirnya sekte-sekte teologis-politik awal dalam Islam: Khawarij dengan doktrin takfir, Syiah dengan legitimasi kepemimpinan berdasarkan Ahlul Bait, dan Murji'ah yang memilih menanggukkan penilaian terhadap para pelaku konflik demi persatuan umat. Dengan demikian, persoalan suksesi dan perebutan kekuasaan tidak lagi sekadar menjadi konflik politik, tetapi bertransformasi menjadi faktor utama yang membentuk perkembangan teologi Islam, menggeser fokus pergulatan intelektual umat dari persoalan syariat praktis menuju perdebatan tentang iman, kufur, legitimasi otoritas penguasa, dan status eskatologis seorang Muslim (Fitrie et al., 2025; Mibtadin, 2020; T. S. Pratama & Prayoga, 2023; Wananda & Mawardi, 2025).

Transformasi politik dari sistem kekhalifahan yang berlandaskan musyawarah mufakat menjadi sistem monarki (*mulk*) di bawah Dinasti Umayyah memperlebar polarisasi tersebut. Isu-isu politik mengenai legitimasi kekuasaan, status pelaku dosa besar, dan takdir manusia melahirkan perdebatan intelektual sengit antara paham Jabariyah (yang sering kali dijadikan legitimasi status quo penguasa) dan Qadariyah. Pergulatan ini membuktikan bahwa penguasa mulai menggunakan doktrin keagamaan sebagai instrumen hegemoni politik, sementara kelompok intelektual oposisi menggunakan nalar teologis sebagai bentuk perlawanan (Bustomi et al., 2025; Zainudin, 2015b).

Puncak dialektika antara kekuasaan dan nalar mencapai titik kulminasinya pada masa Dinasti Abbasiyah. Mengusung semangat egalitarianisme dan keterbukaan terhadap peradaban non-Arab (Persia, Yunani, dan India), Abbasiyah memfasilitasi sebuah gerakan ilmiah masif yang dikenal sebagai *The Islamic Golden Age*. Institusi seperti *Bayt al-Hikmah* menjadi simbol globalisasi ilmu pengetahuan melalui gerakan penerjemahan besar-besaran. Kendati demikian, kebebasan intelektual ini tidak luput dari intervensi politik. Peristiwa *Mihnah* (inkuisisi teologis) yang diprakarsai oleh Khalifah Al-Ma'mun guna memaksakan doktrin Mu'tazilah tentang kemakhluhan Al-Qur'an menjadi preseden historis yang kelam sekaligus monumental. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana sains dan teologi rasional diadopsi sebagai ideologi resmi negara untuk menundukkan otoritas kaum tradisional yang dipimpin oleh Ahmad bin Hanbal (Giffari, 2026; Rahman & Sudirman, 2024; Wibowo, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu, bahwa setiap masa peradaban Islam memiliki corak dan dinamika tersendiri mengenai isu politik dan pergulatan pemikiran yang ada di dalamnya. Pada masa Rasulullah saw., yang melewati fase Makkah dan Madinah memiliki corak berbeda di antara keduanya. Periode Makkah, dakwah Islam difokuskan kepada penguatan tauhid dan akidah, serta keadaan pada saat itu mendapatkan resistensi dari kafir Quraisy yang memegang legitimasi politik masyarakat pada saat itu yang terpusat di dar al-nadwah. Maka dari itu Rasulullah saw., cenderung menggunakan strategi gerilya dalam menyebarkan Islam (dakwah secara sembunyi-sembunyi), sebagaimana ketika Rasul memberikan pengajaran kepada sahabat bersifat terpusat dan rahasia di bait al-arqam. Sementara di Madinah, keadaan cenderung lebih terbuka dan diterima oleh masyarakat di dalamnya. Rasul lebih berfokus menyatukan kubu yang berselisih antara penduduk asli di Madinah dan membaut kesepahaman dengan kalangan lainnya yang tidak termasuk kaum muslimin (Yahudi, Nasrani dan lainnya), sehingga terjadi piagam Madinah. Maka dari itu pendekatan Rasul ketika di Madinah cenderung lebih terbuka dan terang-terang, sebagaimana beliau membangun masjid sebagai pusat pergerakan kaum muslimin dan keilmuan dengan mendirikan ashabussufah, serta membangun pasar sebagai pusat ekonomi umat (Fauzi et al., 2021; Sriwardona et al., 2023)

Masa Khulafaur Rasyidin ditandai oleh pergeseran isu politik dari konsolidasi internal pasca-wafatnya Rasulullah dan ekspansi wilayah pada era awal, menuju krisis legitimasi kekuasaan, faksionalisme, serta pembunuhan politik (*regicide*) yang memuncak pada peristiwa *Fitnah al-Kubra*. Isu-isu politik krusial seperti suksesi kepemimpinan, sentralisasi ekonomi, dan konflik arbitrase (*Tabkim*) ini secara kausalitas menggerakkan roda intelektual Islam untuk keluar dari zona moralitas praktis menuju ranah dialektika konseptual yang rumit. Akibatnya, gerakan intelektual pada periode ini tidak lagi hanya berpusat pada kodifikasi tekstual Al-Qur'an dan Sunnah demi standardisasi hukum, melainkan bertransformasi menjadi laboratorium pemikiran teo-politik awal yang melahirkan faksi-faksi besar seperti Khawarij, Syiah, dan Murji'ah, di mana nalar keagamaan mulai difungsikan untuk mendefinisikan batas-batas keimanan, hakikat dosa besar, dan legalitas otoritas penguasa (Gultom, 2022; M. B. P. Pratama et al., 2025).

Masa Dinasti Umayyah (661–750 M) ditandai oleh transformasi mendasar sistem politik Islam dari model kekhalifahan berbasis musyawarah menjadi monarki hereditas yang dimulai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan melalui penetapan suksesi berdasarkan garis keturunan. Perubahan ini berhasil menciptakan stabilitas politik dan memperluas wilayah Islam hingga Afrika Utara, Andalusia, serta sebagian Asia Tengah, disertai dengan pembangunan sistem administrasi, birokrasi, dan arabisasi pemerintahan. Namun, kebijakan tersebut juga memicu berbagai gejolak politik, seperti perlawanan kelompok Syiah yang menuntut legitimasi kepemimpinan Ahlul Bait, pemberontakan Khawarij terhadap otoritas negara, serta ketidakpuasan kaum *mawālī* (Muslim non-Arab) akibat praktik diskriminasi sosial dan politik. Di tengah dinamika tersebut, gerakan intelektual Islam mengalami perkembangan yang signifikan. Kodifikasi hadis mulai dirintis secara lebih

sistematis, disiplin ilmu fikih berkembang melalui ijtihad para sahabat dan tabi'in di pusat-pusat keilmuan seperti Madinah, Makkah, Kufah, dan Basrah, sementara kajian tafsir dan ilmu bahasa Arab semakin diperkuat untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an di tengah meluasnya wilayah Islam. Selain itu, perdebatan teologis mengenai kebebasan manusia, takdir, serta legitimasi kekuasaan melahirkan aliran-aliran pemikiran seperti Qadariyah dan Jabariyah, yang kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu kalam pada periode Abbasiyah. Dengan demikian, Dinasti Umayyah merupakan fase ketika konsolidasi politik negara berjalan beriringan dengan lahirnya tradisi intelektual yang semakin sistematis, meskipun perkembangan tersebut tidak terlepas dari pengaruh konflik politik dan pertarungan legitimasi kekuasaan (Wahab, 2023).

Masa Dinasti Abbasiyah (750–1258 M) merupakan periode ketika dinamika politik dan perkembangan intelektual Islam mencapai tingkat yang paling kompleks. Secara politik, Dinasti Abbasiyah lahir melalui revolusi yang menggulingkan Dinasti Umayyah dengan dukungan kelompok Persia, mawālī, dan simpatisan Ahlul Bait, sehingga pada awal pemerintahannya berhasil membangun legitimasi baru dan memusatkan kekuasaan di Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan. Meskipun demikian, perjalanan politik Abbasiyah tidak sepenuhnya stabil karena diwarnai oleh perebutan kekuasaan di lingkungan istana, meningkatnya pengaruh birokrasi Persia dan militer Turki, munculnya dinasti-dinasti otonom di berbagai wilayah, serta melemahnya otoritas khalifah pada periode akhir. Di sisi lain, kondisi politik yang relatif stabil pada masa awal Abbasiyah justru menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya gerakan intelektual Islam. Dukungan para khalifah terhadap aktivitas keilmuan melahirkan gerakan penerjemahan besar-besaran karya-karya Yunani, Persia, dan India melalui Bayt al-Hikmah, yang kemudian mendorong kemajuan pesat dalam berbagai disiplin ilmu, seperti tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ilmu kalam, filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan ilmu-ilmu alam (Sujana et al., 2026).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa dinamika politik dan perkembangan intelektual pada setiap fase sejarah Islam, mulai dari masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, hingga Dinasti Abbasiyah, telah banyak dikaji secara parsial dengan menitikberatkan pada periode, tokoh, aliran pemikiran, maupun peristiwa politik tertentu. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu perkembangan isu-isu politik dan gerakan intelektual dalam sejarah peradaban Islam. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar karena tidak hanya mendeskripsikan dinamika politik atau perkembangan pemikiran secara terpisah, melainkan menganalisis hubungan dialektis antara perubahan konfigurasi politik dengan lahirnya gerakan-gerakan intelektual pada setiap periode sejarah secara komprehensif dan berkesinambungan, sehingga mampu menunjukkan pola kontinuitas dan transformasi keduanya dari masa kenabian hingga Dinasti Abbasiyah. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan: **(1)** bagaimana perkembangan isu-isu politik pada masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah; **(2)** bagaimana

perkembangan gerakan intelektual pada masing-masing periode tersebut; dan (3) bagaimana hubungan antara dinamika politik dengan perkembangan gerakan intelektual dalam membentuk peradaban Islam klasik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan isu-isu politik, mengkaji transformasi gerakan intelektual, serta menjelaskan relasi timbal balik antara kekuasaan politik dan perkembangan pemikiran Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga Dinasti Abbasiyah. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah historiografi politik Islam dan sejarah intelektual Islam melalui pendekatan yang integratif, sekaligus memberikan kontribusi konseptual mengenai hubungan antara otoritas politik dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, pendidik, dan pemerhati sejarah peradaban Islam dalam memahami proses terbentuknya tradisi politik dan intelektual Islam secara komprehensif serta relevansinya terhadap pengembangan pemikiran Islam dan studi politik Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN (Bold 12pt)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data mengutamakan studi pustaka (*library research*), data dikumpulkan melalui data primer dan sekunder, meliputi buku, artikel jurnal ilmiah dan dokumen penunjang lainnya (Saefullah, 2024). Analisis data dilakukan dengan pendekatan Miles dan Hubberman melalui analisis data, reduksi data dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014; Spradley & Huberman, 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masa Rasulullah SAW: Integrasi Wahyu, Otoritas Politik, dan Transformasi Sosial

Pada periode kenabian, bangunan politik dan aktivitas intelektual berada dalam pola integrasi yang mutlak di bawah bimbingan wahyu. Relasi ini tidak memperlihatkan adanya dikotomi antara wilayah profanik (politik-kekuasaan) dan wilayah sakral (keagamaan-keilmuan). Namun, dinamika di dalamnya mengalami transformasi struktural yang signifikan ketika bergerak dari fase Makkah ke fase Madinah. Masa Rasulullah SAW merupakan fase paling fundamental dalam sejarah peradaban Islam karena pada periode inilah struktur politik, sistem sosial, dan tradisi intelektual dibangun secara simultan di bawah bimbingan wahyu. Berbeda dengan peradaban-peradaban besar lain yang umumnya mengalami pemisahan antara otoritas agama dan otoritas politik, Islam sejak awal justru menempatkan keduanya dalam hubungan yang bersifat integral. Rasulullah SAW tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penyampai risalah (*rasūl*), tetapi juga sebagai kepala negara, hakim, panglima militer, diplomat, pendidik, dan pemimpin masyarakat.

Oleh karena itu, dinamika politik pada masa kenabian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses pembentukan negara, melainkan sebagai mekanisme implementasi nilai-nilai wahyu dalam membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan, berkeadaban, dan berorientasi pada kemaslahatan. Karakter integratif tersebut kemudian menjadi fondasi utama bagi lahirnya tradisi intelektual Islam yang menjadikan wahyu sebagai sumber epistemologi, sementara akal berfungsi sebagai instrumen untuk memahami, mengembangkan, dan mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan sosial.

Secara politik, fase Makkah dan Madinah memperlihatkan dua corak strategi kepemimpinan yang berbeda sesuai dengan konteks sosial yang dihadapi Rasulullah SAW. Pada periode Makkah, umat Islam berada dalam posisi sebagai kelompok minoritas yang belum memiliki otoritas politik. Struktur kekuasaan ketika itu dikuasai oleh elite Quraisy melalui lembaga Dar al-Nadwah yang mengendalikan aspek ekonomi, sosial, dan keagamaan masyarakat Arab. Dominasi politik Quraisy menyebabkan dakwah Islam menghadapi resistensi yang sangat kuat karena ajaran tauhid yang dibawa Rasulullah SAW dipandang mengancam legitimasi religius dan ekonomi kaum aristokrat Makkah yang memperoleh keuntungan dari sistem penyembahan berhala di sekitar Ka'bah (Amanilla et al., 2024; Oktaviana & Harahap, 2020). Dengan demikian, konflik pada fase Makkah bukan sekadar konflik teologis antara tauhid dan politeisme, tetapi juga merupakan pertarungan politik antara sistem sosial jahiliyah yang berbasis kesukuan dengan visi masyarakat baru yang dibangun atas dasar keimanan, persamaan, dan keadilan.

Situasi tersebut mendorong Rasulullah SAW menerapkan strategi politik yang adaptif melalui dakwah secara bertahap (*tadarruj*). Pada fase awal, penyebaran Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi (*sirriyyah*) dengan menjadikan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai pusat pembinaan kader. Strategi ini menunjukkan bahwa pembentukan kekuatan politik Islam diawali oleh pembangunan kualitas sumber daya manusia sebelum melakukan transformasi sosial yang lebih luas. Fokus utama Rasulullah SAW bukanlah merebut kekuasaan politik secara revolusioner, melainkan membangun fondasi ideologis dan moral masyarakat melalui internalisasi akidah tauhid, pembentukan karakter (*tarbiyah*), serta penanaman etika sosial (Mawasti, 2024; Yakub, 2021). Dengan kata lain, perubahan politik dalam Islam sejak awal berangkat dari revolusi intelektual dan spiritual, bukan semata-mata melalui perebutan kekuasaan.

Pembentukan masyarakat intelektual pada periode Makkah dilakukan melalui pendidikan yang berpusat pada Al-Qur'an. Wahyu-wahyu Makkiyyah lebih banyak menekankan persoalan tauhid, keimanan kepada hari akhir, pembentukan akhlak, dan kritik terhadap praktik-praktik sosial yang diskriminatif seperti perbudakan, eksploitasi ekonomi, serta kesenjangan sosial (Mursyid & Awaliyah, 2021). Pola pendidikan tersebut melahirkan generasi sahabat yang memiliki ketangguhan intelektual sekaligus integritas moral. Mereka tidak hanya memahami ajaran Islam secara tekstual, tetapi juga memiliki kemampuan menerjemahkan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam tindakan sosial. Oleh sebab itu, gerakan intelektual Islam pada fase awal bukanlah aktivitas akademik dalam pengertian formal,

melainkan proses transformasi cara berpikir (*worldview transformation*) dari paradigma jahiliyah menuju paradigma tauhid.

Perubahan mendasar terjadi setelah peristiwa hijrah ke Madinah pada tahun 622 M. Hijrah tidak hanya menandai perpindahan geografis umat Islam, tetapi juga merupakan transformasi politik dari komunitas dakwah menjadi komunitas negara (*state formation*). Di Madinah, Rasulullah SAW memperoleh legitimasi politik sebagai pemimpin masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok etnis dan agama, seperti kaum Muhajirin, Anshar, Yahudi, dan suku-suku Arab lainnya. Keberagaman tersebut menuntut lahirnya sistem pemerintahan yang mampu menjamin stabilitas sosial tanpa menghilangkan identitas masing-masing kelompok (Anas & Adinugraha, 2017; Hidayati, 2016).

Respons Rasulullah SAW terhadap kondisi tersebut diwujudkan melalui Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*), yang oleh banyak sejarawan dipandang sebagai salah satu konstitusi tertulis pertama dalam sejarah dunia. Piagam ini mengatur hak dan kewajiban seluruh kelompok masyarakat, menjamin kebebasan beragama, menetapkan mekanisme penyelesaian konflik, serta membangun konsep kewargaan yang melampaui ikatan kesukuan. Melalui Piagam Madinah, Rasulullah SAW berhasil mentransformasikan masyarakat tribal menjadi masyarakat politik (*political community*) yang disatukan oleh prinsip keadilan, persaudaraan (*ukhunnwah*), tanggung jawab bersama, dan supremasi hukum. Dengan demikian, legitimasi negara Islam tidak dibangun atas dasar etnisitas ataupun dominasi mayoritas, melainkan berdasarkan kesepakatan sosial (*social contract*) yang berorientasi pada kemaslahatan seluruh warga (Azhar, 2017; Karima et al., 2023).

Keberhasilan membangun sistem politik tersebut memiliki implikasi yang sangat besar terhadap perkembangan gerakan intelektual Islam. Stabilitas politik memungkinkan lahirnya institusi-institusi pendidikan yang menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan. Masjid Nabawi berkembang menjadi pusat pemerintahan, tempat musyawarah, lembaga peradilan, sekaligus pusat pendidikan masyarakat. Di dalam kompleks masjid dibentuk Ashab al-Suffah, yaitu komunitas sahabat yang secara khusus memperoleh pembinaan langsung dari Rasulullah SAW dalam bidang Al-Qur'an, hadis, fikih, kepemimpinan, dan dakwah (Baqar & Shafiq, 2019). Dari komunitas inilah lahir generasi ulama pertama yang kemudian menyebarkan Islam ke berbagai wilayah Arab.

Berbeda dengan tradisi pendidikan pada masa sebelumnya yang bersifat eksklusif dan terbatas pada kalangan elite, pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW bersifat terbuka dan egaliter. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh ilmu tanpa membedakan status sosial, suku, maupun latar belakang ekonomi. Rasulullah SAW bahkan memberikan penghargaan tinggi kepada para sahabat yang memiliki kompetensi keilmuan dengan mengangkat mereka sebagai penulis wahyu, guru, hakim, maupun utusan diplomatik. Kebijakan ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan menjadi salah satu instrumen utama dalam pembangunan negara Islam.

Gerakan intelektual pada masa Rasulullah SAW juga ditandai oleh berkembangnya budaya literasi (Merdekawati et al., 2025). Sebagaimana wahyu pertama yang memerintahkan membaca (*iqra'*) menjadi dasar epistemologis bahwa aktivitas keilmuan merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Rasulullah SAW mendorong para sahabat untuk menulis wahyu, mendokumentasikan berbagai perjanjian politik, mencatat transaksi ekonomi, serta mempelajari bahasa asing untuk kepentingan diplomasi (Laili, 2024). Setelah Perang Badar, beberapa tawanan perang bahkan dibebaskan dengan syarat mengajarkan baca tulis kepada kaum Muslim. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan intelektual dipandang sebagai investasi strategis bagi keberlangsungan negara (L. M. Siregar, 2016).

Selain membangun tradisi literasi, Rasulullah SAW juga mengembangkan budaya musyawarah (*shūrā*) sebagai mekanisme pengambilan keputusan politik. Dalam berbagai peristiwa, seperti Perang Uhud, Perang Khandaq, maupun penyusunan strategi pemerintahan, Rasulullah SAW melibatkan para sahabat untuk memberikan pandangan dan argumentasi. Tradisi ini menunjukkan bahwa wahyu tidak meniadakan fungsi akal, tetapi justru memberikan ruang bagi rasionalitas manusia dalam persoalan-persoalan yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash (Saufan, 2015). Dengan demikian, budaya musyawarah menjadi embrio berkembangnya tradisi ijtihad yang kelak menjadi salah satu karakter utama perkembangan intelektual Islam.

Di samping itu, perkembangan intelektual pada masa Rasulullah SAW memiliki karakter yang sangat aplikatif. Ilmu tidak dipahami sebagai aktivitas teoritis semata, tetapi diarahkan untuk menyelesaikan persoalan konkret masyarakat. Setiap turunnya wahyu senantiasa berkaitan dengan dinamika sosial yang sedang dihadapi umat, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara kontekstual. Metode ini membentuk pola berpikir para sahabat yang mampu menghubungkan teks keagamaan dengan realitas sosial. Karakter inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya tradisi ijtihad pada masa Khulafaur Rasyidin.

Hubungan erat antara politik dan gerakan intelektual pada masa Rasulullah SAW memperlihatkan bahwa kemajuan peradaban Islam tidak lahir semata-mata dari ekspansi wilayah ataupun kekuatan militer, melainkan dari keberhasilan membangun ekosistem sosial yang menjadikan ilmu sebagai fondasi pembangunan masyarakat. Stabilitas politik menciptakan ruang bagi berkembangnya pendidikan, sementara kemajuan intelektual memperkuat legitimasi politik melalui pembentukan masyarakat yang berakhlak, kritis, dan bertanggung jawab. Hubungan tersebut bersifat dialektis, di mana kekuasaan digunakan untuk memfasilitasi perkembangan ilmu, sedangkan ilmu menjadi pedoman dalam mengarahkan praktik kekuasaan agar tetap berada dalam koridor wahyu dan kemaslahatan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa masa Rasulullah SAW merupakan fase integrasi sempurna antara politik dan intelektual dalam sejarah Islam. Politik tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk merealisasikan nilai-

nilai ilahiah dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, gerakan intelektual tidak berkembang secara independen dari realitas sosial-politik, tetapi hadir sebagai kekuatan transformasi yang membentuk struktur masyarakat baru berdasarkan prinsip tauhid, keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan penghormatan terhadap ilmu pengetahuan. Model integratif yang dibangun Rasulullah SAW inilah yang kemudian menjadi paradigma dasar bagi perkembangan politik dan intelektual Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah, meskipun pada periode-periode berikutnya hubungan keduanya mengalami perubahan akibat dinamika perebutan kekuasaan, ekspansi wilayah, dan perkembangan pemikiran yang semakin kompleks.

Masa Khulafaur Rasyidin: Krisis Legitimasi Politik dan Lahirnya Gerakan Intelektual Islam

Berbeda dengan masa Rasulullah SAW yang ditandai oleh integrasi penuh antara otoritas wahyu dan kepemimpinan politik, periode Khulafaur Rasyidin memperlihatkan dimulainya proses transformasi politik yang sangat menentukan arah perkembangan peradaban Islam. Wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 M bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam, tetapi juga menghadirkan persoalan mendasar mengenai mekanisme suksesi kepemimpinan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam bentuk institusi politik yang baku. Kondisi tersebut menjadikan persoalan kepemimpinan sebagai isu politik pertama yang harus segera diselesaikan agar stabilitas umat tetap terjaga. Berbeda dengan masa kenabian yang memperoleh legitimasi langsung melalui wahyu, legitimasi kekhalifahan setelah Rasulullah dibangun melalui musyawarah (*syūrā*), konsensus (*ijmā'*) para sahabat, dan penerimaan masyarakat (Sipahutar et al., 2026). Oleh karena itu, periode Khulafaur Rasyidin menjadi fase awal ketika proses politik mulai bertumpu pada ijtihad manusia dalam mengelola negara, sehingga dinamika politik yang berkembang pada masa ini memiliki pengaruh langsung terhadap pembentukan tradisi intelektual Islam.

Proses pengangkatan Abu Bakar as-Siddiq sebagai khalifah di Saqifah Bani Sa'idah merupakan contoh pertama praktik politik Islam pasca-kenabian. Meskipun berlangsung melalui musyawarah, peristiwa tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan Muhajirin dan Anshar mengenai siapa yang paling berhak memimpin umat Islam. Akan tetapi, keputusan yang dihasilkan akhirnya diterima sebagai bentuk konsensus demi menghindari perpecahan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, legitimasi politik dalam Islam dibangun melalui pertimbangan kemaslahatan umat, bukan semata-mata berdasarkan garis keturunan ataupun dominasi kelompok tertentu (Abdilah et al., 2025; Abdullah, 2021).

Tantangan politik terbesar pada masa Abu Bakar muncul melalui Perang Riddah, yaitu gerakan penolakan membayar zakat, kemunculan nabi-nabi palsu, dan upaya sebagian kabilah Arab melepaskan diri dari otoritas Madinah. Secara politik, perang ini bukan sekadar operasi militer, melainkan langkah strategis untuk mempertahankan integritas negara Islam yang baru terbentuk. Apabila gerakan tersebut dibiarkan, maka negara Islam

berpotensi kembali terfragmentasi ke dalam sistem kesukuan sebagaimana sebelum Islam. Oleh karena itu, keberhasilan Abu Bakar menumpas Perang Riddah menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pemerintahan Islam sekaligus membuka jalan bagi ekspansi wilayah pada masa berikutnya (Ishak, 2025).

Di balik dinamika politik tersebut, muncul pula perkembangan intelektual yang sangat penting, yaitu dimulainya kodifikasi Al-Qur'an. Banyaknya penghafal Al-Qur'an yang gugur dalam Perang Yamamah menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya sebagian wahyu. Atas usulan Umar bin Khattab, Abu Bakar kemudian memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan seluruh catatan Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Kebijakan ini menunjukkan bahwa krisis politik justru melahirkan inovasi intelektual yang sangat menentukan perkembangan peradaban Islam. Dengan demikian, dinamika politik tidak hanya menghasilkan konflik, tetapi juga mendorong lahirnya institusi-institusi keilmuan yang berfungsi menjaga otentisitas sumber ajaran Islam (Hidayatullah et al., 2025; Sakinah et al., 2025).

Stabilitas politik yang berhasil diwujudkan Abu Bakar kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Masa pemerintahannya sering dipandang sebagai periode konsolidasi institusi politik Islam. Ekspansi wilayah berlangsung sangat pesat hingga meliputi Persia, Syam, Mesir, dan sebagian Afrika Utara. Bertambah luasnya wilayah kekuasaan membawa konsekuensi munculnya tantangan administratif yang semakin kompleks. Umar merespons kondisi tersebut dengan membangun sistem birokrasi yang lebih modern melalui pembentukan *dimān*, baitul mal, sistem penggajian tentara, administrasi perpajakan, pembagian wilayah pemerintahan, pembentukan lembaga peradilan, hingga penyusunan kalender Hijriah sebagai sistem administrasi negara. Reformasi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Umar tidak hanya berorientasi pada ekspansi wilayah, tetapi juga pada pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkeadilan (Akbar et al., 2024; Firdaus & Roza, 2023).

Kemajuan administrasi negara pada masa Umar memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan intelektual Islam. Meluasnya wilayah Islam menyebabkan para sahabat menyebar ke berbagai kota seperti Kufah, Basrah, Damaskus, dan Fustat sebagai gubernur, hakim, guru, maupun penyebar dakwah. Proses penyebaran tersebut melahirkan pusat-pusat keilmuan baru yang kemudian berkembang menjadi embrio lahirnya berbagai mazhab fikih pada masa berikutnya. Di sisi lain, persoalan-persoalan baru yang muncul akibat interaksi dengan masyarakat non-Arab mendorong berkembangnya praktik ijtihad dalam menyelesaikan persoalan hukum yang belum ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, perkembangan intelektual pada masa Umar menunjukkan bahwa perluasan politik secara langsung memperluas ruang perkembangan ilmu pengetahuan (Almakki, 2019; Basri et al., 2024; Rizkia & Hardiyansyah, 2022).

Berbeda dengan dua khalifah sebelumnya, masa Utsman bin Affan memperlihatkan munculnya persoalan politik yang jauh lebih kompleks. Pada awal pemerintahannya, stabilitas negara masih terjaga dan ekspansi wilayah tetap berlangsung. Namun, memasuki paruh kedua pemerintahannya, muncul berbagai kritik terhadap kebijakan pengangkatan kerabat dekat sebagai gubernur di beberapa wilayah strategis. Kebijakan tersebut dipersepsikan sebagian kelompok sebagai bentuk nepotisme yang bertentangan dengan semangat egalitarianisme pada masa sebelumnya. Selain itu, muncul ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah yang semakin memperkuat ketidakpuasan masyarakat di berbagai provinsi (Desri et al., 2023).

Akumulasi ketegangan politik tersebut akhirnya bermuara pada pengepungan rumah Utsman dan pembunuhan sang khalifah. Peristiwa ini menjadi titik balik sejarah politik Islam karena untuk pertama kalinya seorang khalifah terbunuh akibat konflik politik internal. Dampaknya tidak hanya berupa krisis pemerintahan, tetapi juga terjadinya polarisasi sosial yang sangat tajam di tengah masyarakat Muslim. Sejak saat itu, persoalan politik tidak lagi dipandang sebagai urusan administratif pemerintahan, tetapi mulai memasuki wilayah keyakinan dan identitas keagamaan (Murtiningsih, 2018).

Di sisi lain, masa Utsman juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan intelektual melalui standardisasi mushaf Al-Qur'an. Meluasnya wilayah Islam menyebabkan munculnya perbedaan dialek dalam pembacaan Al-Qur'an yang berpotensi memunculkan perpecahan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Utsman membentuk tim kodifikasi yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit guna menyusun Mushaf Utsmani sebagai standar resmi bagi seluruh wilayah Islam. Kebijakan ini merupakan salah satu capaian intelektual terbesar dalam sejarah Islam karena berhasil menjaga keseragaman teks Al-Qur'an hingga masa kini (Dalimunthe, 2024; Rindra et al., 2023). Dengan demikian, di tengah krisis politik yang berkembang, negara tetap menjalankan fungsi strategis dalam menjaga otoritas keilmuan Islam.

Krisis politik mencapai puncaknya pada masa Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Ali sebagai khalifah tidak secara otomatis mengakhiri konflik karena tuntutan untuk segera menghukum pembunuh Utsman melahirkan pertentangan dengan beberapa sahabat, termasuk Aisyah, Talhah, dan Zubair. Konflik tersebut berkembang menjadi Perang Jamal, kemudian berlanjut pada Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kedua perang tersebut memperlihatkan bahwa konflik politik telah berubah menjadi perang saudara yang melibatkan sesama umat Islam (A. Y. Siregar & Amril, 2025).

Kebuntuan dalam Perang Siffin menghasilkan keputusan Tahkim (arbitrase politik), yang justru melahirkan implikasi intelektual sangat besar (Junaidin, 2020). Sebagian pendukung Ali menolak keputusan arbitrase karena menganggap hukum Allah tidak boleh digantikan oleh keputusan manusia. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai Khawarij. Sebaliknya, pendukung Ali mengembangkan gagasan bahwa kepemimpinan umat merupakan hak keluarga Nabi yang memiliki legitimasi religius, yang kemudian menjadi

dasar berkembangnya Syiah. Di sisi lain, muncul Murji'ah yang memilih menangguhkan penilaian terhadap status keimanan para pelaku konflik dan menyerahkan keputusan akhir kepada Allah. Ketiga kelompok tersebut menunjukkan bahwa konflik politik telah bertransformasi menjadi persoalan teologi (Al Anang & Husein, 2020; Mibtadin, 2020; Nugraha et al., 2024).

Transformasi tersebut menjadi titik awal lahirnya ilmu kalam dalam sejarah Islam. Persoalan-persoalan seperti hakikat iman, status pelaku dosa besar, legitimasi penguasa, hubungan antara agama dan negara, serta batas-batas ketaatan kepada pemimpin mulai diperdebatkan secara sistematis. Dengan kata lain, politik menjadi variabel utama yang mendorong berkembangnya refleksi intelektual umat Islam. Pergeseran ini menandai perubahan orientasi gerakan intelektual dari sekadar pemeliharaan wahyu menuju pengembangan argumentasi rasional untuk menjawab persoalan-persoalan sosial-politik yang semakin kompleks (Rezky et al., 2025).

Selain perkembangan teologi, tradisi ijtihad juga mengalami kemajuan pada masa Khulafaur Rasyidin. Para sahabat mulai mengembangkan metode penalaran hukum melalui qiyas, musyawarah, dan pertimbangan kemaslahatan dalam menghadapi berbagai persoalan baru akibat ekspansi wilayah. Tradisi ini menjadi fondasi bagi berkembangnya usul fikih dan mazhab-mazhab hukum Islam pada periode berikutnya. Dengan demikian, meskipun periode Khulafaur Rasyidin diwarnai oleh berbagai konflik politik, masa ini justru menjadi laboratorium intelektual yang melahirkan dasar-dasar disiplin ilmu keislaman klasik (Aziz et al., 2024; U. Rachman & Widodo, 2023; Zainudin, 2015a).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa masa Khulafaur Rasyidin merupakan fase transisi yang sangat menentukan dalam sejarah peradaban Islam. Di satu sisi, konflik politik mengenai suksesi, legitimasi kekuasaan, dan perang saudara memperlihatkan semakin kompleksnya tata kelola negara setelah berakhirnya masa kenabian. Di sisi lain, dinamika politik tersebut justru mendorong berkembangnya gerakan intelektual melalui kodifikasi Al-Qur'an, perluasan tradisi ijtihad, lahirnya pusat-pusat keilmuan, serta munculnya perdebatan teologis yang kemudian menjadi fondasi ilmu kalam dan pemikiran politik Islam. Dengan demikian, hubungan antara politik dan intelektual pada masa Khulafaur Rasyidin bersifat dialektis: konflik politik melahirkan kebutuhan akan formulasi pemikiran baru, sementara perkembangan intelektual berupaya memberikan legitimasi, kritik, maupun solusi terhadap persoalan-persoalan politik yang dihadapi umat Islam.

Masa Dinasti Umayyah: Transformasi Monarki Islam dan Konsolidasi Gerakan Intelektual

Berdirinya Dinasti Umayyah pada tahun 661 M menandai perubahan mendasar dalam sejarah politik Islam, yaitu transformasi sistem pemerintahan dari model kekhalifahan berbasis musyawarah (*syūrā*) menjadi monarki hereditas (*hereditary monarchy*). Pergantian sistem tersebut diawali oleh pengangkatan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah setelah berakhirnya konflik politik pada masa Ali bin Abi Thalib. Berbeda dengan para khalifah sebelumnya yang memperoleh legitimasi melalui musyawarah para sahabat, Muawiyah memperkenalkan mekanisme suksesi berdasarkan garis keturunan dengan mengangkat putranya, Yazid bin Muawiyah, sebagai penerus kekuasaan. Kebijakan ini membawa perubahan paradigma dalam politik Islam, di mana stabilitas pemerintahan mulai diprioritaskan melalui sentralisasi kekuasaan, meskipun pada saat yang sama memunculkan kritik mengenai legitimasi politik dan kesesuaiannya dengan tradisi politik Islam pada masa Khulafaur Rasyidin (T. Rachman, 2018). Dengan demikian, periode Umayyah menjadi fase ketika orientasi politik Islam bergeser dari model kepemimpinan kolektif menuju pemerintahan dinasti yang lebih terstruktur dan birokratis.

Konsolidasi politik yang dilakukan Muawiyah berhasil mengakhiri perang saudara yang berlangsung pada akhir masa Khulafaur Rasyidin serta menciptakan stabilitas pemerintahan yang relatif kuat. Untuk memperkuat kontrol terhadap wilayah kekuasaan yang semakin luas, Dinasti Umayyah membangun birokrasi pemerintahan yang lebih sistematis melalui penguatan lembaga *dimān*, penataan administrasi perpajakan, pembentukan sistem pos (*al-barid*), serta reorganisasi militer (Al Ahqaf, 2020; Zuchroh, 2023). Pusat pemerintahan dipindahkan ke Damaskus yang secara geografis lebih strategis untuk mengendalikan wilayah Islam yang membentang dari Semenanjung Iberia di barat hingga Asia Tengah di timur. Stabilitas politik tersebut memungkinkan Dinasti Umayyah melaksanakan ekspansi wilayah secara besar-besaran hingga mencakup Afrika Utara, Andalusia, Transoxiana, dan wilayah Sind di India. Keberhasilan ekspansi ini menjadikan kekhalifahan Islam sebagai salah satu imperium terbesar pada abad ke-7 dan ke-8 M (Adib, 2024; Azzahro et al., 2024; Wati et al., 2025).

Namun demikian, keberhasilan ekspansi politik tidak sepenuhnya diikuti oleh stabilitas sosial (Juliana & Chan, 2026). Salah satu isu politik yang paling dominan pada masa Umayyah adalah persoalan legitimasi kekuasaan. Sebagian kelompok umat Islam, terutama Syiah, tetap memandang bahwa kepemimpinan umat seharusnya berada di tangan keturunan Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Ketegangan tersebut mencapai puncaknya pada tragedi Karbala tahun 680 M yang menyebabkan wafatnya Husain bin Ali beserta para pengikutnya. Peristiwa ini tidak hanya memperdalam polarisasi politik antara penguasa Umayyah dan kelompok Syiah, tetapi juga membentuk identitas keagamaan Syiah yang semakin kuat melalui narasi tentang syahadah, kezaliman politik, dan perjuangan menegakkan keadilan. Sejak saat itu, konflik politik tidak lagi bersifat sementara, melainkan

berkembang menjadi perbedaan ideologis yang bertahan dalam sejarah Islam hingga masa-masa berikutnya (Amatullah et al., 2026; Yuwono et al., 2024).

Selain menghadapi oposisi dari kelompok Syiah, pemerintahan Umayyah juga terus berhadapan dengan gerakan Khawarij yang menolak legitimasi seluruh penguasa yang dianggap tidak menjalankan hukum Allah secara sempurna. Berbagai pemberontakan Khawarij terjadi di Irak, Persia, dan wilayah Jazirah Arab, sehingga pemerintah harus mengalokasikan sumber daya politik dan militer yang besar untuk menjaga stabilitas negara (Amrullah, 2018; Larasati, 2024). Di sisi lain, muncul pula ketidakpuasan dari kelompok *mawālī*, yaitu Muslim non-Arab yang merasa diperlakukan tidak setara dengan bangsa Arab dalam aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Meskipun telah memeluk Islam, sebagian *mawālī* masih dikenakan beban pajak tertentu dan memiliki akses yang terbatas terhadap jabatan pemerintahan. Diskriminasi tersebut secara perlahan melemahkan legitimasi Dinasti Umayyah dan menjadi salah satu faktor yang kemudian dimanfaatkan oleh gerakan Abbasiyah untuk memperoleh dukungan politik pada akhir pemerintahan Umayyah (Hana & Azis, 2023; Maysaroh, 2023).

Di balik dinamika politik tersebut, Dinasti Umayyah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan gerakan intelektual Islam. Stabilitas pemerintahan dan luasnya wilayah kekuasaan menciptakan ruang interaksi antara masyarakat Arab dengan berbagai tradisi intelektual Persia, Romawi, Bizantium, dan India. Interaksi lintas budaya tersebut mendorong berkembangnya berbagai disiplin ilmu keislaman, meskipun orientasi keilmuan pada masa Umayyah masih didominasi oleh upaya menjaga kemurnian sumber-sumber ajaran Islam. Salah satu perkembangan paling penting ialah dimulainya proses kodifikasi hadis secara lebih sistematis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dipandang sebagai tokoh yang memberikan perhatian besar terhadap pelestarian Sunnah Nabi dengan memerintahkan para ulama, termasuk Ibn Syihab al-Zuhri, untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kebijakan ini merupakan tonggak penting dalam sejarah intelektual Islam karena menjadi fondasi bagi penyusunan kitab-kitab hadis pada periode Abbasiyah (Al Ahqaf, 2020; Juliana & Chan, 2026; Larasati, 2024).

Selain hadis, perkembangan ilmu fikih juga mengalami kemajuan yang pesat. Meluasnya wilayah Islam menyebabkan munculnya berbagai persoalan hukum yang belum pernah dihadapi pada masa sebelumnya, seperti pengelolaan administrasi negara, hubungan dengan masyarakat non-Muslim, perdagangan internasional, serta persoalan muamalah di wilayah-wilayah baru. Kondisi tersebut mendorong para sahabat dan generasi tabi'in untuk mengembangkan tradisi ijtihad yang lebih sistematis. Kota Madinah berkembang sebagai pusat tradisi hadis (*ahl al-hadith*), sedangkan Kufah menjadi pusat tradisi rasional (*ahl al-ra'yi*) yang lebih banyak menggunakan analogi (*qiyas*) dalam menjawab persoalan hukum. Perbedaan metodologi tersebut kemudian menjadi embrio lahirnya mazhab-mazhab fikih besar pada masa Abbasiyah (Hirzullah, 2023; Puspita, 2015).

Perkembangan intelektual pada masa Umayyah juga tampak dalam bidang ilmu bahasa Arab. Bertambah banyaknya masyarakat non-Arab yang memeluk Islam menimbulkan kekhawatiran terhadap kesalahan dalam membaca dan memahami Al-Qur'an. Untuk mengatasi persoalan tersebut, para ulama seperti Abu al-Aswad al-Du'ali mulai merumuskan kaidah-kaidah tata bahasa Arab (*nahwu*) serta sistem pemberian titik dan harakat pada mushaf Al-Qur'an. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kemurnian bacaan Al-Qur'an, tetapi juga menjadi fondasi bagi berkembangnya ilmu linguistik Arab yang kelak mencapai kematangan pada masa Abbasiyah. Dengan demikian, kebutuhan politik untuk menjaga kesatuan masyarakat Islam secara tidak langsung mendorong lahirnya inovasi-inovasi dalam bidang ilmu bahasa (Manshur, 2003).

Di bidang teologi, dinamika politik Umayyah juga melahirkan berbagai perdebatan intelektual yang semakin kompleks. Persoalan legitimasi kekuasaan dan tanggung jawab moral penguasa memunculkan diskursus mengenai hubungan antara kehendak Tuhan dan kebebasan manusia. Dari perdebatan tersebut lahir aliran Qadariyah yang menekankan kebebasan manusia dalam menentukan perbuatannya serta Jabariyah yang berpandangan bahwa seluruh tindakan manusia telah ditentukan oleh kehendak Allah (Anis, 2015; Hirzullah, 2023). Perdebatan antara kedua aliran tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks politik Dinasti Umayyah. Sebagian penguasa menggunakan doktrin Jabariyah untuk memperkuat legitimasi kekuasaan dengan menyatakan bahwa kedudukan mereka merupakan takdir Allah yang tidak boleh dipersoalkan. Sebaliknya, kelompok oposisi lebih dekat dengan gagasan Qadariyah karena menekankan adanya tanggung jawab moral manusia, termasuk penguasa, terhadap setiap tindakan politik yang dilakukan (Batubara et al., 2021; Ramadhani, 2022). Dengan demikian, isu politik secara langsung membentuk arah perkembangan ilmu kalam pada masa awal Islam.

Meskipun dinamika intelektual berkembang cukup pesat, karakter gerakan keilmuan pada masa Umayyah masih bersifat desentralistik. Aktivitas ilmiah lebih banyak berlangsung di masjid-masjid dan halaqah para ulama dibandingkan melalui lembaga pendidikan yang terorganisasi oleh negara. Para sahabat, tabi'in, dan tabi' al-tabi'in menjadi aktor utama dalam transmisi ilmu melalui tradisi lisan, pengajaran langsung, dan penulisan awal berbagai disiplin ilmu. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan intelektual Islam pada masa Umayyah tumbuh dari kebutuhan masyarakat dan komunitas ilmiah, meskipun tetap memperoleh dukungan dari beberapa khalifah, terutama Umar bin Abdul Aziz yang dikenal memberikan perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan dan reformasi pemerintahan (Anis, 2015; Hirzullah, 2023; Seiawan & Sodikin, 2023; Yusnadi & Fakhrurrazi, 2020).

Secara keseluruhan, Dinasti Umayyah memperlihatkan hubungan yang erat antara dinamika politik dan perkembangan intelektual Islam. Di satu sisi, perubahan sistem pemerintahan menjadi monarki, konflik legitimasi, tragedi Karbala, pemberontakan Khawarij, serta persoalan diskriminasi terhadap *mawali* menunjukkan bahwa politik Islam memasuki fase yang lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Di sisi lain, tantangan-tantangan tersebut justru mendorong berkembangnya tradisi keilmuan melalui kodifikasi hadis, perkembangan fikih, pembentukan ilmu nahwu, serta lahirnya perdebatan teologis yang menjadi fondasi ilmu kalam. Dengan demikian, masa Umayyah merupakan fase konsolidasi politik sekaligus transisi intelektual yang menjembatani tradisi keilmuan generasi sahabat dan tabi'in menuju puncak perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah. Hubungan antara politik dan intelektual pada periode ini menunjukkan pola yang saling memengaruhi: stabilitas politik memungkinkan berkembangnya institusi dan tradisi keilmuan, sementara berbagai konflik politik menjadi pemicu lahirnya gagasan-gagasan intelektual baru yang membentuk corak pemikiran Islam klasik.

Dinasti Abasiyyah: Dinamika Politik dan Puncak Gerakan Intelektual Islam

aaaBerdirinya Dinasti Abbasiyah pada tahun 750 M merupakan titik balik penting dalam sejarah politik Islam. Dinasti ini lahir melalui revolusi yang berhasil menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah dengan memperoleh dukungan dari berbagai kelompok yang selama ini merasa dipinggirkan, seperti kaum *mawālī* (Muslim non-Arab), masyarakat Persia, serta sebagian pendukung Ahlul Bait. Berbeda dengan Dinasti Umayyah yang berorientasi pada dominasi elite Arab, pemerintahan Abbasiyah membangun legitimasi politik melalui gagasan persatuan umat dan keterbukaan terhadap berbagai etnis dalam struktur pemerintahan (Safitri & Afrizal, 2024). Khalifah Abu al-Abbas al-Saffah dan penerusnya, Abu Ja'far al-Mansur, melakukan konsolidasi politik secara sistematis dengan memusatkan pemerintahan di Baghdad, sebuah kota yang kemudian berkembang menjadi pusat administrasi, perdagangan, dan peradaban Islam. Pemindahan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad bukan sekadar perubahan geografis, tetapi mencerminkan pergeseran orientasi politik Abbasiyah yang lebih dekat dengan tradisi administrasi Persia serta lebih terbuka terhadap interaksi dengan berbagai kebudayaan dunia (Aprianty, 2022).

Pada masa awal Abbasiyah, stabilitas politik relatif berhasil diwujudkan melalui pembentukan birokrasi yang lebih profesional dan kompleks. Jabatan wazir berkembang menjadi institusi penting yang membantu khalifah dalam mengelola pemerintahan, sementara sistem administrasi, perpajakan, keuangan, dan peradilan mengalami penyempurnaan. Pengaruh tradisi birokrasi Persia memberikan warna baru dalam tata kelola pemerintahan Islam, sehingga negara tidak lagi hanya bergantung pada otoritas pribadi khalifah, tetapi mulai didukung oleh lembaga-lembaga administrasi yang terorganisasi (Giffari, 2026). Stabilitas tersebut memungkinkan pemerintahan Abbasiyah mengendalikan wilayah yang sangat luas dan menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang kondusif bagi berkembangnya aktivitas perdagangan, urbanisasi, dan pertukaran ilmu pengetahuan (Aulia et al., 2026; Az-zahra et al., 2026). Dengan demikian, dinamika politik

pada periode awal Abbasiyah menunjukkan bahwa tata kelola negara yang efektif menjadi prasyarat penting bagi kemajuan peradaban Islam .

Meskipun demikian, stabilitas politik tersebut tidak berlangsung secara permanen. Memasuki abad ke-9 M, Dinasti Abbasiyah menghadapi berbagai tantangan internal yang semakin kompleks. Persaingan antar keluarga istana dalam memperebutkan kekuasaan, meningkatnya pengaruh para wazir dan pejabat birokrasi, serta dominasi militer Turki dalam urusan pemerintahan secara bertahap mengurangi otoritas khalifah. Di berbagai wilayah, muncul pula dinasti-dinasti semiotonom, seperti Aghlabiyah di Afrika Utara, Thahiriyah dan Saffariyah di Persia, hingga Buwaihiyah dan Seljuk pada periode berikutnya, yang secara de facto menjalankan pemerintahan sendiri meskipun tetap mengakui legitimasi simbolik khalifah Abbasiyah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan politik Abbasiyah mengalami proses desentralisasi yang berdampak pada melemahnya kontrol pemerintah pusat. Pada masa akhir pemerintahan Abbasiyah, konflik politik semakin diperparah oleh tekanan eksternal, termasuk Perang Salib dan invasi Mongol yang berpuncak pada jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 M. Peristiwa tersebut mengakhiri dominasi politik Abbasiyah sekaligus menandai berakhirnya era klasik kekhalifahan Islam (Fitriani et al., 2024; Hakiki, 2012; Harvina et al., 2025; Pangaribuan, 2024).

Di balik dinamika politik yang silih berganti, Dinasti Abbasiyah justru menjadi periode paling gemilang dalam sejarah perkembangan intelektual Islam. Stabilitas pemerintahan pada masa khalifah-khalifah awal, terutama al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan al-Ma'mun, menciptakan iklim yang sangat kondusif bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan. Para khalifah tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga menjadi patron ilmu pengetahuan dengan memberikan dukungan finansial, perlindungan, dan fasilitas kepada para ulama, ilmuwan, filsuf, penerjemah, serta cendekiawan dari berbagai latar belakang agama dan etnis. Dukungan negara terhadap aktivitas ilmiah menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat peradaban sekaligus meningkatkan legitimasi politik kekhalifahan (Wulandari et al., 2025).

Salah satu pencapaian terbesar Dinasti Abbasiyah adalah lahirnya gerakan penerjemahan (*translation movement*) yang berpusat di Bayt al-Hikmah (House of Wisdom) di Baghdad. Lembaga ini berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penelitian, akademi, sekaligus tempat penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, India, dan Syriac ke dalam bahasa Arab. Melalui aktivitas tersebut, berbagai karya Aristoteles, Plato, Galen, Hippocrates, Euclid, Ptolemy, dan ilmuwan klasik lainnya dapat dipelajari, dikritisi, dan dikembangkan oleh para sarjana Muslim. Gerakan penerjemahan ini tidak sekadar memindahkan teks ke bahasa Arab, tetapi juga melahirkan proses kreatif berupa sintesis antara warisan intelektual klasik dengan nilai-nilai Islam (Furoidah, 2020; Khaeruddin, 2024; Nurohman, 2020). Oleh karena itu, Dinasti Abbasiyah bukan hanya menjadi pewaris peradaban kuno, tetapi juga menjadi pusat inovasi ilmu pengetahuan yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sains dunia.

Perkembangan intelektual pada masa Abbasiyah mencakup hampir seluruh cabang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, periode ini ditandai dengan kodifikasi hadis secara sistematis melalui penyusunan kitab-kitab hadis induk oleh para muhaddis, seperti Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Ibn Majah. Pada saat yang sama, ilmu fikih mencapai kematangan melalui berkembangnya empat mazhab besar Ahl al-Sunnah, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang masing-masing mengembangkan metodologi istinbat hukum berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijmak, qiyas, dan berbagai metode ijtihad lainnya. Bersamaan dengan itu, Imam al-Syafi'i meletakkan dasar-dasar ilmu usul fikih melalui karya *al-Risalah*, yang menjadi fondasi metodologis bagi pengembangan hukum Islam hingga masa kini (Al Anang, 2019; Artika et al., 2025; Nabila et al., 2023).

Selain ilmu-ilmu syariat, perkembangan intelektual Abbasiyah juga mencapai puncaknya dalam bidang filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, kimia, geografi, dan ilmu-ilmu alam. Tokoh-tokoh seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, al-Khawarizmi, Jabir ibn Hayyan, al-Battani, dan al-Biruni menghasilkan berbagai karya ilmiah yang tidak hanya berpengaruh di dunia Islam, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa pada masa Renaissance. Kemajuan tersebut menunjukkan bahwa tradisi intelektual Islam pada masa Abbasiyah bersifat multidisipliner dan terbuka terhadap berbagai sumber pengetahuan tanpa kehilangan identitas keislamannya (Giffari, 2026; Wibowo, 2021).

Namun, pesatnya perkembangan intelektual juga melahirkan perdebatan teologis yang sangat intens. Salah satu isu utama adalah hubungan antara akal (*al-'aql*) dan wahyu (*al-naql*) dalam memahami ajaran Islam. Perdebatan tersebut melahirkan berbagai aliran ilmu kalam, terutama Mu'tazilah yang menempatkan rasionalitas sebagai instrumen utama dalam memahami doktrin keagamaan, dan Ahl al-Sunnah yang berupaya menyeimbangkan penggunaan akal dengan otoritas wahyu. Kontroversi mencapai puncaknya pada masa Khalifah al-Ma'mun melalui kebijakan *mihnah* (inquisisi), yaitu ujian terhadap para ulama mengenai doktrin kemakhlukan Al-Qur'an yang dianut Mu'tazilah. Ulama yang menolak pandangan tersebut, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, mengalami tekanan politik dan pemenjaraan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa perkembangan intelektual tidak selalu berlangsung secara independen, tetapi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa (Amir & Rahman, 2025; Munawwar et al., 2026).

Meskipun *mihnah* pada akhirnya dihentikan, peristiwa tersebut memberikan pelajaran penting mengenai hubungan antara negara dan otoritas keilmuan. Intervensi politik terhadap persoalan akidah memperlihatkan bahwa kekuasaan dapat memengaruhi arah perkembangan pemikiran, namun pada saat yang sama juga memunculkan resistensi intelektual yang memperkuat independensi ulama. Dari dinamika inilah kemudian berkembang tradisi keilmuan Islam yang lebih kritis dan plural, di mana perbedaan pandangan diperdebatkan melalui argumentasi ilmiah, bukan semata-mata melalui otoritas politik (Firmansyah et al., 2026; Putra & Riyadi, 2022).

Di samping itu, perkembangan lembaga pendidikan turut menjadi faktor penting dalam kemajuan intelektual Abbasiyah. Masjid, perpustakaan, majelis ilmu, dan kemudian madrasah berkembang sebagai pusat transmisi ilmu pengetahuan. Tradisi *halaqah* memungkinkan terjadinya dialog ilmiah antara guru dan murid, sementara jaringan ulama yang tersebar di berbagai kota memperkuat penyebaran ilmu ke seluruh wilayah Islam. Mobilitas para penuntut ilmu (*rihlah fi talab al-'ilm*) menciptakan jejaring intelektual yang menghubungkan Baghdad, Kufah, Basrah, Damaskus, Kairo, hingga Andalusia. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah tidak hanya didorong oleh negara, tetapi juga oleh komunitas ilmiah yang aktif membangun tradisi akademik secara mandiri (Artika et al., 2025; Kamalia & Putri, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Dinasti Abbasiyah merupakan periode ketika hubungan antara politik dan intelektual mencapai tingkat yang paling kompleks dalam sejarah Islam klasik. Stabilitas politik pada masa awal pemerintahan memberikan ruang bagi berkembangnya ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan, dan tradisi ilmiah yang melahirkan era *Islamic Golden Age*. Sebaliknya, dinamika politik berupa perebutan kekuasaan, desentralisasi pemerintahan, serta intervensi negara terhadap persoalan teologi turut memengaruhi arah perkembangan pemikiran Islam. Oleh karena itu, kemajuan intelektual pada masa Abbasiyah tidak dapat dipisahkan dari konteks politik yang melingkupinya. Politik berperan sebagai fasilitator sekaligus faktor yang membatasi perkembangan ilmu pengetahuan, sedangkan gerakan intelektual menjadi kekuatan yang memperkaya peradaban Islam melalui sintesis antara wahyu, rasionalitas, dan pengalaman empiris. Hubungan dialektis inilah yang menjadikan Dinasti Abbasiyah sebagai puncak perkembangan politik dan intelektual dalam sejarah peradaban Islam klasik

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan politik dan gerakan intelektual dalam sejarah Islam memiliki hubungan yang bersifat dialektis dan saling memengaruhi sejak masa Rasulullah SAW hingga Dinasti Abbasiyah. Pada masa Rasulullah SAW, politik dan intelektual terintegrasi secara utuh di bawah bimbingan wahyu melalui pembentukan masyarakat Madinah yang berlandaskan keadilan, musyawarah, dan supremasi hukum, sementara aktivitas intelektual berfokus pada internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah sebagai fondasi transformasi sosial. Memasuki masa Khulafaur Rasyidin, persoalan suksesi kepemimpinan dan konflik politik melahirkan dinamika baru yang mendorong kodifikasi Al-Qur'an, berkembangnya tradisi ijtihad, serta munculnya perdebatan teologis yang menjadi embrio ilmu kalam. Pada masa Dinasti Umayyah, perubahan sistem pemerintahan menjadi monarki hereditas diikuti dengan konsolidasi birokrasi dan ekspansi wilayah, yang sekaligus mendorong perkembangan kodifikasi hadis, fikih, ilmu bahasa Arab, dan diskursus teologis. Selanjutnya, Dinasti Abbasiyah menjadi puncak perkembangan peradaban Islam melalui stabilitas politik pada periode awal, dukungan negara terhadap

ilmu pengetahuan, gerakan penerjemahan, berkembangnya berbagai disiplin ilmu, serta lahirnya tradisi intelektual yang menjadikan Baghdad sebagai pusat keilmuan dunia Islam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perubahan konfigurasi politik tidak hanya memengaruhi stabilitas pemerintahan, tetapi juga menentukan arah, karakter, dan perkembangan gerakan intelektual Islam. Sebaliknya, perkembangan intelektual turut memberikan legitimasi, kritik, maupun koreksi terhadap praktik politik, sehingga hubungan keduanya membentuk fondasi peradaban Islam klasik yang dinamis. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan historiografi politik Islam dengan menempatkan dinamika politik dan gerakan intelektual sebagai dua variabel yang saling berkaitan, bukan sebagai fenomena yang berdiri sendiri. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, pendidik, mahasiswa, serta pemerhati sejarah dan politik Islam dalam memahami proses pembentukan tradisi politik dan intelektual Islam secara lebih komprehensif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan fokus pada analisis historis sehingga belum mengeksplorasi secara mendalam aspek komparatif antarsumber primer maupun pengaruh faktor sosial-ekonomi dan budaya terhadap perkembangan politik dan intelektual Islam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan pendekatan interdisipliner, memanfaatkan sumber-sumber primer klasik secara lebih intensif, serta melakukan kajian komparatif dengan perkembangan politik dan intelektual pada dinasti-dinasti Islam setelah Abbasiyah.

Berdasarkan temuan penelitian, lembaga pendidikan tinggi, institusi keagamaan, dan pengambil kebijakan di bidang pendidikan Islam disarankan mengintegrasikan kajian sejarah politik dan sejarah intelektual Islam secara lebih holistik dalam kurikulum. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun pemahaman yang lebih kritis mengenai hubungan antara kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan peradaban sehingga nilai-nilai keadilan, musyawarah, toleransi, serta tradisi keilmuan Islam dapat diaktualisasikan dalam menjawab tantangan masyarakat kontemporer.

DAFTAR REFERENSI

- Abdilah, A., Sujana, A. M., Muflihah, E., Putri, E. D., Suhandi, I. I. A., & Ramadhan, F. K. (2025). Kepemimpinan Abu Bakar Ash Shiddiq dalam Masa Transisi Pasca Wafatnya Nabi Muhammad. *Arus Jurnal Psikologi Dan Pendidikan*, 4(3), 433–439. <https://doi.org/10.57250/ajpp.v4i3.1752>
- Abdullah, A. (2021). Analisis kritis teori dan penerapan konsep khilafah pasca Nabi SAW wafat. *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 4(1), 147–160. <https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.3492>
- Abrori, M. F., Huda, M. A., & Shohib, M. (2026). Kodifikasi Al-Qur'an dari Masa Nabi

- Muhammad Saw hingga Khalifah Utsman Bin Affan (Dinamika, Kontroversi, dan Pembelaan Intelektual Muslim). *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 11(01), 161.
- Adib, M. A. (2024). Memahami pusat-pusat peradaban Islam masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(2). <https://doi.org/10.62281/v2i2.163>
- Akbar, A., Daulay, E. M., Yani, R., Hutapea, S. A., & Hadi, M. I. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Islam (Periode Khulafaurrasyidin Pada Masa Umar Bin Khattab). *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(1), 91–107. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v10i1.2567>
- Al Ahqaf, M. I. (2020). Pemikiran Dan Peradaban Islam Pada Masa Bani Umayyah. *Researchgate. Net, December*.
- Al Anang, A. (2019). Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dalam Islam. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 3(2), 98–108.
- Al Anang, A., & Husein, A. (2020). Genealogi Aliran-Aliran Politik dalam Islam. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 4(2), 68–79. <https://doi.org/10.29408/fhs.v4i2.2592>
- Almakki, A. (2019). KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB. *STUDI HUKUM ISLAM INTERDISIPLINER Madzhab "Sunan Giri,"* 11(24), 123–140. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.14>
- Alvianti, M. D., Adila, A., & Kusumaningrum, A. (2025). Islam sebagai pilar peradaban ilmu pengetahuan dunia: Sebuah kajian atas kontribusinya terhadap perkembangan ilmu dan kebudayaan. *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 23(2), 303–313. <https://doi.org/10.52266/kreatif.v23i2.4936>
- Amanilla, B., Pratama, M. B., Ramadhan, S., Badriyah, L. Y., Aulia, M. R., & Noviani, D. (2024). Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Rasulullah SAW; Rasulullah SAW Sebagai Pemimpin Agama dan Negara. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(1), 225–238. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.948>
- Amatullah, A., Santalia, I., & Masykur, A. (2026). Analisis Historis: Akar-Akar Kemunculan dan Konsolidasi Syiah dalam Sejarah Islam Awal. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 624–629. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.9571>
- Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2025). Historical Development Of The Mu 'Tazilite Theological School Of Thought. *Jurnal SAMBAS (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah): Journal of Religious, Community, Culture, Costume, History Studies*, 7(2), 94–105.
- Amrullah, S. (2018). Melacak Jejak Radikalisme dalam Islam: Akar Ideologis dan Eksistensinya dari Masa ke Masa. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.29062/dirasah.v1i2.5>
- Anas, A., & Adinugraha, H. H. (2017). Dakwah Nabi Muhammad terhadap masyarakat Madinah perspektif komunikasi antarbudaya. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(1), 53–72.

- Anis, M. (2015). Potret Pendidikan Masa Dinasti Umayyah. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 7(1), 107–116. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v7i1.185>
- Aprianty, S. (2022). Refleksi Awal Terbentuknya Dinasti Abbasiyah. *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, 2(2), 171–180.
- Artika, R. D., Sapphire, C. N., Putri, S. Z., Maulana, A. F. R., & Al Faruq, U. (2025). Dinasti Abbasiyah sejarah transformasi: Perkembangan ilmu pengetahuan. *DEWARUCI: Jurnal Studi Sejarah Dan Pengajarannya*, 3(1), 291–296.
- Aulia, R., Ismail, M., & Azmi, A. N. (2026). ANALISIS STRATEGI EKONOMI, POLITIK, ILMU PENGETAHUAN, DAN SOSIAL BUDAYA DALAM KEJAYAAN DINASTI ABBASIYAH. *An Nawawi*, 6(1), 25–36. <https://doi.org/10.55252/1bef8083>
- Az-zahra, S. F., Salsabillah, N. A., & Mawardi, K. (2026). DINASTI ABBASIYAH: ANTARA REVOLUSI POLITIK DAN KEMAJUAN PERADABAN PENDIDIKAN ISLAM. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12(3), 328–344. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i3.16345>
- Azhar, A. (2017). Sejarah Dakwah Nabi Muhammad Pada Masyarakat Madinah: Analisis Model Dakwah Ukhuwah Basyariah Dan Ukhuwah Wathaniyah. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 1(2), 257–276. <https://doi.org/10.30829/j.v1i2.1203>
- Aziz, A., Fadillah, F., Abdillah, M. Z., Lubis, P. N. Z., & Sari, S. K. (2024). Perekonomian Pada Masa Al-Khulafa Al-Rasyidin. *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa*, 2(1), 134–144. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.59059/perspektif.v2i1.967>
- Azzahro, H. A., Nasiha, M. A., Rozy, M. F., & Amiruddin, M. (2024). Jejak dan Sejarah Munculnya Ilmu Kesehatan dan Pendidikan Pada Masa Dinasti Umayyah. *Jurnal Seumubeuet*, 3(2), 149–160. <https://doi.org/10.63732/jsmbt.v3i2.114>
- Baqar, S., & Shafiq, M. O. (2019). A COMPARATIVE STUDY RELATED TO THE EFFECTS OF SOCIALIZATION AND SOCIAL NETWORKS ON THE STUDENTS OF AL-SUFFAH ISLAMIC UNIVERSITY AND THE MODERN UNIVERSITIES IN KARACHI CITY. *Habibia Islamicus (The International Journal of Arabic and Islamic Research)*, 3(1), 111–124.
- Basri, M., Irwani, N. R., & Nurhayati, N. (2024). Peradaban Islam Masa Khalifah Umar Bin Khattab. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(1), 157–161. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.926>
- Batubara, W., Daulay, H. P., & Dahlan, Z. (2021). Teologi Jabariyah dan Qodariyah dalam Tinjauan Sejarah Islam Periode Klasik. *Local History & Heritage*, 1(2), 34–41. <https://doi.org/10.57251/lhh.v1i2.63>
- Bustomi, B., Ismail, I., Ismail, F., & Zuhdiyah, Z. (2025). Pola Gerakan Intelektual Islam Klasik. *Jurnal Multidisiplin Debasen (MUDE)*, 4(3), 387–394. <https://doi.org/10.37676/mude.v4i3.8881>
- Dalimunthe, L. A. (2024). Peradaban Islam Masa Khalifah Utsman bin Affan (24-36 H/644-656 M). *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 204–215. <https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v2i1.664>

- Daulay, M. R., & Nasution, A. S. (2023). Islam Sebagai Agama dan Peradaban. *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v1i1.128.g76>
- Desri, S., Nazaruddin, E., Ikhsan, S., Syadiq, A., & Hutasuhut, N. N. (2023). Gaya kepemimpinan Utsman bin Affan pada masa kepemimpinannya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 8255–8262.
- Dzulhadi, Q. N. (2015). Islam sebagai Agama dan Peradaban. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 11(1), 151–168. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i1.258>
- Fahmi, F. (2020). Potret islam sebagai agama dan peradaban modern. *Jurnal Al-Fatih*, 3(2), 203–214. <https://doi.org/10.30821/alfatih.v3i2.91>
- Fauzi, I., Mukti, A., & Dahlan, Z. (2021). Pembangunan Pemerintahan Madinah Melalui Pemikiran Dan Usaha Intelektual Perspektif Peradaban Islam Masa Nabi Muhammad Saw. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 8(2). <https://doi.org/10.56015/governance.v8i2.46>
- Firdaus, F., & Roza, E. (2023). Sejarah Perkembangan Peradaban Islam Di Mesir Pada Masa Umar Bin Khattab. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (Jkip)*, 4(1), 234–240. <https://doi.org/10.55583/jkip.v4i1.712>
- Firmansyah, Y. A. F., Hasanah, L. I., & Akbar, M. M. (2026). Mu'tazilah: Sejarah Rasionalisme Islam, Dinamika Kekuasaan Abbasiyah, dan Relevansinya dalam Pemikiran Kontemporer. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 4(1), 82–92. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v4i1.2897>
- Fitriani, O. N., Mutmainnah, S., Nurjannah, O. V., & Abbas, N. (2024). Dominasi Keluarga Barmaki, Buwaihi, dan Saljuki dalam Dinamika Politik Abbasiyah. *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 2(4), 48–59. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v2i4.1232>
- Fitrie, N. R., Sujana, A. M., Amzaeni, D. U., & Widyatmaka, N. D. (2025). Ketika Kekuasaan Di Uji: Nepotisme, Fitnah, dan Perang Saudara di Zaman Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 4379–4384. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1865>
- Furoidah, A. (2020). Peran Bahasa Arab dalam Pengembangan Ilmu dan Peradaban Islam di Masa Daulah Abbasiyah (Studi Literatur). *Al-Fusha: Arabic Language Education Journal*, 2(1), 43–59. <https://doi.org/10.36835/alfusha.v2i1.352>
- Giffari, A. (2026). Transisi Umayyah-Abbasiyah: Tata Kelola, Ekonomi, dan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.62712/jurpai.v2i1.36>
- Gultom, A. N. (2022). Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin. *EDU-RILIGLA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 6(2), 167–180. <https://doi.org/10.47006/er.v6i2.13159>
- Hakiki, K. M. (2012). Mengkaji ulang sejarah politik kekuasaan dinasti abbasiyah. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 8(1), 113–134. <https://doi.org/10.24042/tps.v8i1.1547>
- Hana, M. Y., & Azis, M. N. I. (2023). Dinamika Inklusi Sosial Masyarakat Islam: Posisi Kaum Mawali Dalam Pembangunan Umat Islam Di Jazirah Arab. *El Tarikh: Journal of*

- History, Culture and Islamic Civilization*, 4(1), 45–53.
<https://doi.org/10.24042/jhcc.v4i1.16766>
- Harvina, M. J., Ramadhan, N. B. K., & Roza, E. (2025). Penyerangan Mongol Terhadap Dinasti Abbasiyah Dan Dampaknya Pada Peradaban Islam Serta Bidang Sosial-Politik Tahun 1258 M. *Batuthab: Jurnal Sejarah Padaban Islam*, 4(2), 207–218.
<https://doi.org/10.38073/batuthah.v4i2.2629>
- Hidayati, N. (2016). POTRET MANAJAMEN RASULULLAHSAW KETIKA BERDAKWAH DI MADINAH AL-MUNAWWARAH. *TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2). //journal.stainkudus.ac.id/index.php/tadbir%0A
- Hidayatullah, M. B., Kamila, W., & Fernanda, T. (2025). Masa Keemasan dan kepemimpinan Kekhalifahan Abu Bakar As Shidiq. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 2090–2100. <https://doi.org/10.63822/8qdq4786>
- Hirzullah, M. F. (2023). Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Pendidikan Pada Masa Dinasti Umayyah. *Social Science Academic*, 1(1), 151–162.
<https://doi.org/10.37680/ssa.v1i1.3375>
- Ishak, I. (2025). Dinamika Penyebaran Islam pada Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Tantangan yang Dihadapi. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(2), 1667–1673.
<https://doi.org/10.56832/edu.v5i2.1598>
- Juliana, R., & Chan, N. (2026). PERADABAN ISLAM PADA MASA BANI UMAYYAH DI TIMUR. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(02), 304–326.
<https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.51479>
- Junaidin, J. (2020). Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib Dan Permulaan Konflik Umat Islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 33–48. <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i1.227>
- Kamalia, S., & Putri, A. A. (2025). The Dynamics of Civilization and the Transformation of Islamic Education during the Early Period of the Abbasid Caliphate: Dinamika Peradaban dan Transformasi Pendidikan Islam pada Masa Daulah Abbasiyah Periode Awal. *REACT: Research in Education and Critical Transformation*, 101–112.
- Karima, M. K., Megarani, S., Siregar, J. S., Diwanta, F., Ramadiah, P. S., Tantri, D. A., Marwa, N. A., Azizah, Z. P., Zaki, A., & Saptriana, L. (2023). Telaah Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama dunia. *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, 2(1), 35–47.
<https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216>
- Khaeruddin, K. (2024). Baitul Hikmah sebagai pusat peradaban intelektual pada masa Dinasti Abbasiyah. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 8(1), 1–13.
<https://doi.org/10.52266/tadjid.v8i1.1918>
- Laili, S. (2024). Eksistensi Lembaga Pendidikan Maktab/Kuttab pada Masa Awal Keislaman: Suatu Kritik Sejarah. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 7(2), 182–196.
<https://doi.org/10.24256/iqro.v7i2.5290>
- Larasati, S. (2024). Development of the Umayyad Civilization. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*, 3(3), 281–293. <https://doi.org/10.58355/historical.v3i3.115>

- Manshur, F. M. (2003). Pertumbuhan Dan Perkembangan Budaya Arab Pada Masa Dinasti Umayyah. *Humaniora*, 15(2), 172–180.
- Mawasti, W. (2024). Strategi Membangun Komitmen Organisasi Dakwah pada Tahap Merintis: Studi Organisasi Dakwah Nabi di Mekkah. *Tanzhim: Jurnal Dakwah Terprogram*, 2(1), 45–70. <https://doi.org/10.55372/tanzhim.v2i1.17>
- Maysaroh, M. (2023). Analisis Dampak Arabisasi pada Masa Dinasti Umayyah di Timur: Perspektif Sosial dan Politik (661-750 M). *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 57–61. <https://doi.org/10.57251/hij.v3i2.1466>
- Merdekawati, N. R., Syam, K. A., & Mathar, M. (2025). PERKEMBANGAN LITERASI INFORMASI MASA RASULULLAH SAMPAI KHULAFUR RASYIDIN. *JPUA: Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga: Media Informasi & Komunikasi Kepustakawanan*, 15(2), 101. <https://doi.org/10.20473/jpua.v15i2.2025.101-112>
- Mibtadin, M. (2020). FIRQAH DALAM ISLAM: Pergeseran Nalar Politik ke Sistem Teologi. *Mamba'ul'Ulum*, 16(1), 14–30. <https://doi.org/10.54090/mu.2>
- Miles, Huberman, M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis. In *Sustainability (Switzerland)* (3rd ed., Vol. 11, Issue 1).
- Munawwar, F. Al, Zenggi, I., Pane, A., & Lubi, Z. (2026). The Mu'tazilah Tradition in Islamic Theological Thought: History, Thought, and Its Implications for the Developmen. *Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Amin*, 5(1), 613–624. <https://doi.org/10.54723/ejpgmi.v5i1.655>
- Mursyid, K. G., & Awaliyah, M. (2021). Makkiyah dan Madaniyah dalam al-Qur'an. *Tarbawi*, 9(01), 65–82. <https://doi.org/10.62748/tarbawi.v9i01.69>
- Murtiningsih, M. (2018). Tuduhan nepotisme terhadap Utsman bin Affan dan pengaruhnya terhadap kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 19(1). <https://doi.org/10.19109/jia.v19i1.2385>
- Nabila, R. W., Hasibuan, N. A., Walandari, S., Amalia, D. N., & Azwar, M. D. (2023). Dinamika Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 1(01). <https://doi.org/10.66174/mtq8hp35>
- Najib, M. A., & Imawan, D. H. (2022). Dinamika Intelektual dan Peradaban Islam pada Masa Rasulullah. *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(1), 105. <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i1.12527>
- Nugraha, B., Sara, A., Hikmah, N. N., Ma'arif, S., Azizah, I. N., Parhan, M., & Ghaida, N. F. (2024). Eksplorasi Sekte Khawarij Dan Impresinya Terhadap Ajaran Islam. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(2), 171–178. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i2.224>
- Nurohman, A. (2020). Perpustakaan Baitul Hikmah, Tonggak Kebangkitan Intelektual Muslim. *Al-Ma Mun Jurnal Kajian Kepustakawanan Dan Informasi*, 1(1), 42–54. <https://doi.org/10.24090/jkki.v1i1.4052>
- Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26(01), 283–307. <https://nazharat.fah.uinjambi.ac.id/index.php/nazharat/article/view/29/20>

- Pangaribuan, N. (2024). Ketegangan Politik Antar (Dinasti) Islam di Kawasan Laut Tengah Abad ke-10. *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 5(1), 14–23. <https://doi.org/10.24042/00202452192300>
- Pratama, M. A. Q. (2018). Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1496>
- Pratama, M. B. P., Hidayatullah, M. R., & Yati, R. M. (2025). Sejarah Masa Kekhalifahan dalam Membangun Dunia Islam. *ScriptaHumanika: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1(2), 2019–2026. <https://doi.org/doi.org/10.65310/bsryzw74>
- Pratama, T. S., & Prayoga, D. (2023). Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari tahun 655-660M. *Jazirah: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan*, 4(2), 111–118. <https://doi.org/10.51190/jazirah.v4i2.82>
- Puspita, N. (2015). *Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Bani Ummayah*. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.74>
- Putra, M. H. A., & Riyadi, A. S. M. (2022). Teologi Dan Mistisisme Pada Masa Dinasti Abbasiyah. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 20(1), 103–116. <https://doi.org/10.30762/realita.v20i1.105>
- Rachman, T. (2018). Bani Umayyah Di Lihat Dari Tiga Fase. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(1), 86–98. <https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1079>
- Rachman, U., & Widodo, A. (2023). Pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin dan kontekstualisasinya pada pendidikan Islam masa kini. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(1), 250–259.
- Rahman, H., & Sudirman, S. (2024). From Bayt al-Hikmah to Algebra: The intellectual legacy of the Islamic golden age. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 3(2), 170–186. <https://doi.org/10.15642/jitp>
- Ramadhani, H. (2022). Qadariyah Dan Jabariyah: Sejarah dan Perkembangannya. *EDU-RILIGLA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 4(3). <https://doi.org/10.47006/er.v4i3.12887>
- Rezky, M., Rahmah, N., Suryaningtias, N. D., Malika, D., & Sujana, A. M. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Sejarah Dan Hukum Dalam Kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7351–7360. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2514>
- Rindra, A. S. P., Alimni, A., & Yusuf, M. (2023). Peran Utsman Bin Affan Dalam Perkembangan Pendidikan Islam. *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik*, 4(2), 130–136. <https://doi.org/10.62159/jpt.v4i2.835>
- Rizkia, T. P., & Hardiyansyah, M. R. (2022). Masa Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab. *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2), 88–94. <https://doi.org/10.57251/hij.v2i2.811>

- Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>
- Safitri, Y., & Afrizal, M. (2024). Berdirinya dinasti Bani Abbas. *Jurnal Pendidik Indonesia*, 5(2), 47–53. <https://doi.org/10.61291/jpi.v5i2.51>
- Sakinah, T. A., Mardatilah, W. Z., & Junila, S. (2025). Peradaban Islam pada Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. *Pustaka: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan*, 5(1), 72–82.
- Saufan, A. (2015). Strategi dan Diplomasi Perang Rasulullah. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 13(1), 107–134. <https://doi.org/10.31291/jlk.v13i1.206>
- Seiawan, A. M., & Sodikin, A. (2023). Misi Dakwah Islam Masa Bani Umayyah 661-750 M. *JUSAN: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/jusan.v1i1.5816>
- Sipahutar, F. A., Hasanah, R. R., & Marzuki, M. (2026). The Principle of Shura in the Political Leadership of the Khulafaur Rasyidin and Its Relevance to Contemporary Islamic Politics. *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 6(1). <https://doi.org/10.61974/justness.v6i1.111>
- Siregar, A. Y., & Amril, M. (2025). Ali ibn Abi Talib: The Caliphate Conflicts of Ali ibn Abi Talib and Their Relevance to Modern Islamic Politics. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(5), 1324–1333. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i5.567>
- Siregar, L. M. (2016). Upaya Pendidikan Islam Pada Masa Awal Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 1(1), 104–114. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1\(1\).622](https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1(1).622)
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: اما يهو قدالما هيج نم لنولا ينتهج نم نوكي ءاطلخاو سابقلا في اطلخا نع زاترحلا جاتنلا ةحص نم بجاولا ةقداص قبيضقب قدساف قبيضق سبتلت نأبف نعلما قبيحنا نم امو لاق نا لنا نعلما قبيحنا نم امو ظفلا قبيحنا نم. 1(2), 84–77*.
- Sriwardona, S., Iswandi, I., Azis, L., & Lubis, D. A. (2023). Baitul Arqam sebagai Lembaga Pendidikan pada Masa Rasulullah. *Jurnal Menata: Jurnal Program Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 31–39.
- Sudrajat, S. R., Nurpadilah, S. L., & Kamilah, S. N. (2026). Kebijakan Zakat Pada Masa Khalifah Abu Bakar: Analisis Dampak Perang Riddah Terhadap Stabilitas Ekonomi. *Hadharatuna: Journal of Islamic History and Civilization*, 1(1), 34–50.
- Sujana, A. M., Uyun, Ia., & Putri, N. A. (2026). Perkembangan Dan Keruntuhan Dinasti Abbasiyah. *KARMAWIBANGGA Historical Studies Journal*, 8(1), 29–34. <https://doi.org/10.31316/karmawibangga.v8i1.8986>
- Sulistiana, I. S., Sujana, A. M., Rohillah, I., Sulistiani, L., & Fitriani, A. (2025). Peran Khalifah Umar bin Khattab dalam Membangun Pemerintahan Islam. *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 9(2), 1021–1044. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/8368>

- Thabrani, A. M. (2014). Tata kelola pemerintahan negara madinah pada masa nabi muhammad saw. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 4(1). <https://doi.org/10.14421/inright.v4i1.1273>
- Urmilawati, S., & Syarif, Z. (2026). Dinamika Peradaban Islam: Kajian Sejarah Pemikiran, Politik dan Budaya. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 737–751. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i1.528>
- Wahab, F. (2023). Sejarah dan Perkembangan Dinasti Bani Umayyah dalam Dunia Islam. *JURNAL PUSAKA: Media Kajian Dan Pemikiran Islam*, 13(02), 121–135. <https://doi.org/10.35897/ps.v13i02.1138>
- Wahyuni, S., Lestari, A. R., Mulyani, M., Zuhri, M. T., Munawaroh, N., & Masripah, M. (2025). Sejarah kepemimpinan Utsman bin Affan: Analisis peranannya dalam perkembangan peradaban Islam. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(2), 706–720. <https://doi.org/10.61227/arji.v7i2.346>
- Wananda, Y., & Mawardi, K. (2025). Khulafaurrasyidin in the Shadow of Conflict: a Critical Study of the Transition of Power After the Prophet. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 15(3), 1172–1180. <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i3.3112>
- Wardana, Z. K., Sujana, A. M., Rahmah, R. D., Setiawati, N. L., Nisa, H., & Ramadanti, K. O. (2025). Studi historis tentang krisis kepemimpinan pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 4575–4581. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1947>
- Wati, L., Wulandari, R., Shylviana, S., Idami, R., & Fuadi, S. (2025). Dinasti Umayyah (661-750 M): Peninggalan Sejarah dan Pengaruhnya dalam Perkembangan Islam. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(3), 287–295. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i3.1195>
- Wibowo, T. (2021). Dinamika sains dalam Islam pada masa keemasan (Daulah Abbasiyah): Kontribusi & rekonstruksi dalam perkembangan keilmuan kekinian. *Tsaqofah: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 6(1).
- Wulandari, R., Febriyanti, N., Hermalisa, H., Audiska, N., Putri, I. F., Desfika, T., & Fuadi, S. (2025). Sejarah dan Peran Dinasti Abbasiyyah antara Tahun 750 Hingga 1258 M dalam Peradaban Islam. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(4), 134–145. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i4.1373>
- Yakub, M. (2021). Komunikasi Dakwah Nabi Muhammad Saw Pada Periode Mekah. *Jurnal Komunikasi Islam Dan Kebumasan (JKPI)*, 5(1), 30–52. <https://doi.org/10.19109/jkpi.v5i1.9026>
- Yusnadi, Y., & Fakhrurrazi, F. (2020). Pendidikan Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah. *AT-TA'DIB: JURNAL ILMIAH PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 163–173. <https://doi.org/10.47498/tadib.v12i02.383>
- Yuwono, A. T., Wiratama, N. S., Budiono, H., & Widiatmoko, S. (2024). Keterlibatan Al-Mukhtar bin Abi Ubaid ats-Tsaqafi Terhadap Perkembangan Dark Age of Islam di Dinasti Umayyah dan Ajaran Agama Islam Syiah. *Danadyaksa Historica*, 4(1), 24–39. <https://doi.org/10.32502/jdh.v4i1.8234>

- Zainudin, E. (2015a). Peradaban Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v3i1.1337>
- Zainudin, E. (2015b). Perkembangan Islam Pada Masa Bani Umayyah. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 28–35. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i6.1677>
- Zuchroh, I. (2023). Menapaki Jejak-Jejak Kemajuan Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1329–1334. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7582>
- .